

SUPERVISI PENDIDIKAN IPA BERCIRIKAN DIALOG PROFESIONAL KESEJAWATAN DALAM KONTEKS PELAKSANAAN MBS

Wiyanto
Jurusan Fisika, FMIPA Unnes

Abstract

Stakeholders have high expectation on natural sciences education to make students ready to compete in the fast changing world. To meet the expectation, the natural sciences education needs an educational supervision to assure its quality. The article will discuss a model characterized by professional collegial dialogues. It means that the dialogues must be democratic, equal and respecting each other according to their position. This model has an important role in the school-based management. The discussion includes the rational, the assumption, the goals, the model's components and their relationship, the implementation strategy, and the parameter of success.

Kata kunci: supervisi pendidikan, IPA, dialog profesional kesejawatan

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perubahan pesat, cepat dan luar biasa sering terjadi dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Di tengah perubahan yang pesat ini, lembaga pendidikan sebagai organisasi belajar (*learning organization*) memiliki peran penting dalam mempersiapkan peserta didik baik secara individual maupun kolektif agar mampu hidup secara produktif di dalam masyarakat yang sangat beragam dan dinamis.

Banyak harapan dari *stakeholder* (siswa, orang tua, masyarakat, dunia kerja, lembaga pendidikan yang lebih tinggi, serta pemerintah) terhadap pendidikan ilmu pengetahuan alam (IPA) agar lebih berkontribusi pada penyiapan masyarakat untuk hidup produktif pada abad yang penuh dengan penerapan teknologi. Harapan itu pantas diberikan kepada pendidikan IPA, karena hakikat pendidikan IPA mencakup dua aspek, yaitu produk (konsep, prinsip, teori, hukum) dan proses (metode ilmiah), yang diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan (termasuk *life skill*) yang banyak terkait dengan Iptek pada peserta didik.

Namun, harapan *stakeholder* itu

dihadapkan pada kenyataan bahwa mutu pendidikan IPA masih relatif rendah. Hal ini tercermin antara lain dari hasil survei the *Third International Mathematics and Science Study-Repeat* (TIMSS-R) yang menunjukkan untuk IPA Indonesia berada pada urutan ke-32 dari 38 negara peserta yang dinilai (Baskoro, 2001).

Lembaga pendidikan sebagai penyedia layanan (*service provider*) harus senantiasa memikirkan upaya memenuhi harapan *stakeholder* dan melindunginya dari layanan dan hasil pendidikan yang tidak bermutu. Untuk memenuhi harapan itu diperlukan pengawasan atau supervisi dalam proses pendidikan IPA. Jadi supervisi pendidikan ini memiliki fungsi penjaminan mutu (*quality assurance*).

Dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Pengembangan Program Pendidikan Berbasis Kewilayahan Menyongsong Diterapkannya Kebijakan Otonomi Daerah, Dirjen Dikti pada saat itu (Sidi, 2000) membahas empat isu penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam kerangka otonomi daerah. Satu diantara isu ini adalah peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dinyatakan dalam makalah tersebut bahwa hasil evaluasi terhadap

berbagai strategi pembangunan selama ini menunjukkan strategi pembangunan pendidikan yang paling efektif dan efisien ialah pemberdayaan sekolah, yaitu memberikan kepercayaan yang lebih luas dan mengembalikan urusan pengelolaan pendidikan kepada sekolah (*school based management*).

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah itu perlu dibarengi dengan supervisi yang ketat, karena menurut Satori (2001) supervisi merupakan fungsi manajemen yang berkepentingan dengan efisiensi dan efektivitas kinerja kelembagaan. Dalam pelaksanaan supervisi diperlukan kerja sama dan koordinasi antar individu maupun komponen yang terlibat. Dengan pertimbangan bahwa kerjasama itu melibatkan interaksi antar manusia yang dapat dipengaruhi oleh variabel psikologi (emosi, kematangan, kecerdasan) serta pertimbangan bahwa fungsi supervisi adalah untuk mengamankan mutu (fungsi *quality assurance*) dan akuntabilitas profesional, maka interaksi yang diperkirakan dapat mendukung keberhasilan proses supervisi dalam konteks pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah melalui dialog profesional kesejawatan.

Berikut ini akan dikaji model supervisi pendidikan IPA yang bercirikan dialog profesional kesejawatan. Pembahasannya mencakup rasional, asumsi dan tujuan, komponen model dan hubungan antar komponen, strategi implementasi, serta ukuran keberhasilannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk membangun sistem supervisi pendidikan IPA sebagai sub sistem dari supervisi pendidikan di sekolah.

RASIONAL

Mengapa supervisi diperlukan? Menurut Satori (2001), kegiatan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diperlukan dalam konteks pengawasan terhadap: (1) proses dan hasil pembelajaran dan (2) aspek manajemen

operatif sekolah yang merupakan lingkungan tempat pembelajaran berlangsung. Pengawasan pendidikan di sekolah ini bersifat *student driven*, artinya bahwa kepentingan utamanya adalah menjamin mutu layanan pembelajaran peserta didik sehingga tercapai hasil belajar yang bermutu. Karena sifatnya yang demikian, maka disebut “pengawasan akademik” atau “supervisi akademik”, yang mengandung makna bahwa pengawasan di sekolah ditujukan untuk mengendalikan mutu layanan dan hasil belajar peserta didik. Selain itu, pengawasan pendidikan berkepentingan pula pada penciptaan kondisi suportif dan fasilitatif bagi terwujudnya manajemen operatif sekolah dan mutu pelayanan dalam pembelajaran.

Pembahasan berikut ini diarahkan pada pengembangan model supervisi pendidikan IPA bercirikan pada dialog profesional kesejawatan. Konsep ini bermakna bahwa interaksi, baik dalam konteks individu maupun kelompok, pada proses supervisi dilakukan dengan menekankan dialog interaktif yang demokratis, sejajar (kolegial), saling mengormati, namun tetap profesional. Profesional berarti bahwa masing-masing pihak menempatkan diri sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Hal ini dapat tercapai bila pihak supervisor berkemampuan akademik yang memadai dan berkepribadian menarik sehingga dapat diterima oleh pihak lain. Dengan kata lain, supervisor harus memenuhi syarat *capability* dan *acceptability*.

Model supervisi pendidikan IPA bercirikan dialog profesional kesejawatan ini dikembangkan atas dasar pertimbangan rasional sebagai berikut.

Pertama, keberhasilan kegiatan supervisi pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antara guru (sebagai pihak yang disupervisi) dan supervisor. Interaksi tersebut merupakan interaksi antar manusia yang sangat dipengaruhi oleh variabel psikologi, seperti emosi. Fungsi

dan tujuan supervisi tidak akan tercapai bila dalam pelaksanaannya ada pihak yang merasa dipojokkan, cemas, tersinggung, atau bahkan marah. Karenanya, selain supervisor harus memenuhi kualifikasi akademik, kedua pihak yang berinteraksi harus mampu memahami pihak lain, yang menurut teori psikologi kognitif disebut kemampuan melakukan koordinasi perspektif sosial (Setiono, 1983; Matlin, 1994).

Kedua, interaksi atau komunikasi antara supervisor dan guru diarahkan untuk membantu dan mengubah kognisi, sikap, dan perilaku guru agar mereka berusaha untuk memperbaiki proses pembelajarannya menuju peningkatan mutu layanan dan hasil belajar sebagai *core business* pengawasan pendidikan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses supervisi, maka perlu ditekankan bahwa komunikasi antar guru dan supervisor merupakan komunikasi profesional yang bersifat kolegial atau kesejawatan.

Ketiga, IPA mencakup dua aspek, yaitu IPA sebagai proses yang dikenal dengan metode ilmiah dan IPA sebagai produk atau biasa disebut sebagai *body of knowledge* (NAS, 1996). Pembelajaran IPA di kelas juga mencakup kedua aspek. Walaupun kebanyakan guru sudah menyadari hal ini, namun dalam pelaksanaan pembelajaran IPA banyak yang hanya berorientasi pada produk saja. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, tanpa dilengkapi kegiatan laboratorium. Alasannya, antara lain ujian hanya mengevaluasi aspek pengetahuan saja, demikian juga seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (ke SMP menggunakan nilai ijazah, ke SMA menggunakan NUAN, ke PT melalui tes SPMB). Alasan lain, peralatan laboratorium tidak lengkap, tidak ada laboran, dan penghargaannya kurang. Jadi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran IPA terkait dengan pihak-pihak lain, seperti laboran, kepala sekolah, masyarakat dan

pemerintah (termasuk pemerintah daerah yang kadang menuntut NUAN tinggi). Oleh karena itu dalam pelaksanaan supervisi pendidikan IPA juga harus terjalin kerja sama antara beberapa pihak yang terkait.

Keempat, permasalahan lain yang dihadapi pendidikan IPA adalah materi IPA yang sulit, terutama fisika dan kimia, bukan saja sulit bagi siswa namun juga sulit bagi guru. Guru selain harus memikirkan bagaimana menguasai materi juga harus memikirkan bagaimana mengajarkan dengan baik materi tersebut. Untuk mengatasi hal ini guru dari mata pelajaran yang sama di tingkat kabupaten/ kota membentuk gugus kendali mutu yang dinamakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Di tingkat sekolah guru-guru mata pelajaran yang sama dapat juga membentuk kelompok guru mata pelajaran. Forum tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses pengawasan.

Kelima, pada saat ini sudah terbentuk beberapa forum diskusi atau musyawarah seperti MGMP, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja/ Musyawarah Kepala Sekolah (KKKS/ MKS), Kelompok Kerja/Musyawarah Pengawas sekolah (KKPS/MPS). Forum-forum ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan supervisi.

ASUMSI DAN TUJUAN

Pengembangan model supervisi pendidikan IPA bercirikan dialog profesional kesejawatan dikembangkan berdasarkan pada asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi yang dimaksud adalah: (1) sekolah memiliki guru IPA yang memadai, baik jumlah maupun mutunya, sehingga mereka mengajar sesuai dengan jumlah jam yang ideal dan mereka juga memenuhi mutu minimum yang diperlukan; (2) sekolah memiliki fasilitas pendukung, seperti laboratorium IPA dan perpustakaan dengan laboran dan pustakawannya; (3) jumlah siswa dalam tiap kelas ideal (maksimum 40 siswa per kelas); (4) kepala sekolah

memiliki komitmen terhadap upaya peningkatan pendidikan IPA; (5) di tingkat daerah (kabupaten/kota) tersedia supervisor bidang IPA dalam jumlah yang memadai dan memiliki kompetensi (profesional) di bidangnya; (6) di tingkat daerah sudah terbentuk MGMP, KKKS/MKS, KKPS/MPS; dan (7) lingkungan sekolah mendukung penyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu.

Tujuan utama supervisi pendidikan IPA adalah untuk menjaga mutu layanan pembelajaran dengan cara memperbaiki situasi belajar yang secara spesifik diarahkan agar siswa dapat mengetahui proses IPA, produk IPA, dan aplikasi IPA dalam teknologi, serta bertanggungjawab terhadap diri sendiri maupun kepada masyarakat (Harbeck, 1976). Berdasarkan pada tujuan ini, tanggungjawab supervisor IPA adalah meningkatkan mutu pembelajaran IPA dengan meningkatkan penguasaan guru pada *content knowledge* atau *subject matter knowledge*, *pedagogical content knowledge*, dan *curricular knowledge* (NSTA, 1997).

Tanggung jawab supervisor tersebut tercermin pada keefektifannya mengkoordinasikan usaha bersama dalam pengembangan program pembelajaran, mengembangkan program *in-service* atau reguler bagi guru (NSTA, 1997), dan membangkitkan semangat guru dalam mengimplementasikan perubahan yang dinilai berguna untuk meningkatkan mutu pembelajaran (Eiss, 1976), serta mendorong guru menjadi anggota dan berpartisipasi dalam organisasi profesi pendidikan IPA (NSTA, 1997). Usaha-usaha tersebut secara terus menerus perlu diuji, dianalisis, dan direvisi.

KOMPONEN MODEL DAN HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN

Model supervisi dialog profesional kesejawatan dikembangkan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran yang diharapkan menghasilkan mutu

layanan dan hasil belajar. Pelaksanaan fungsi supervisi dalam model ini melibatkan semua *stakeholder* sebagai komponen yang ikut bertanggungjawab atau peduli terhadap proses pembelajaran. Secara bagan komponen dan hubungan antar komponen dalam model supervisi itu ditunjukkan pada Gambar 1.

Penjelasan dari masing-masing komponen dan keterkaitannya dengan komponen lain dalam model supervisi diuraikan sebagai berikut.

Siswa

Siswa merupakan komponen utama, baik dalam pengawasan terhadap proses dan hasil belajar sebagai *core business* penyelenggaraan pendidikan, maupun dalam pengawasan terhadap aspek manajemen operatif sekolah yang merupakan tempat lingkungan proses pembelajaran berlangsung. Keberhasilan pengawasan ini akan memberikan implikasi kepada terpenuhinya kebutuhan atau kepuasan peserta didik yang juga sebagai *customer* utama atau klien dalam proses pendidikan (Sallis, 1993).

Namun, hasil proses pembelajaran akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan belajar siswa. Dalam konteks sekolah dipandang sebagai industri yang memproduksi jasa (*service provider*), maka peserta didik harus bersikap koproduksi, seperti: belajar, membeli buku, mengerjakan tugas dari guru (Sutrisno, 2001). Tanpa diimbangi dengan upaya yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri, maka upaya perbaikan mutu pendidikan tidak akan tercapai.

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah memegang peranan penting dalam proses pendidikan IPA di sekolah. Selain sebagai pejabat struktural dan administratif di sekolah, kepala sekolah berfungsi juga sebagai supervisor yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dinamika dalam gugus guru,

laboran, tenaga administrasi, dan staf sekolah lainnya guna menjamin layanan yang dihasilkan sesuai spesifikasi atau standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kepala sekolah memerankan fungsi baik dalam pengawasan terhadap proses dan hasil pembelajaran maupun dalam pengawasan terhadap aspek manajemen operatif sekolah. Dengan demikian kepala sekolah akan banyak mewarnai perkembangan suatu sekolah; *the principal makes different*.

Kepala Sekolah harus melaksanakan kepemimpinan yang berfokus pada pembelajaran. Untuk kepentingan pembelajaran IPA, walaupun Kepala Sekolah bukan berlatar belakang pendidikan bidang itu, namun ia harus berusaha memahami karakter pembelajaran IPA, sehingga dapat memberikan evaluasi dan saran atau dukungan untuk peningkatannya, terutama dukungannya terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA yang mencakup dua aspek, yaitu produk dan proses.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai supervisor, kepala sekolah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Diantaranya, yang pertama, koordinasi dan kerjasama dialogis-profesional kesejawatan dengan pengawas maupun KKKPS/MPS. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan adanya tumpang tindih pengawasan, dan untuk memperoleh persamaan persepsi tentang tugas-tugas kesupervisian diantara mereka. Kedua, kepala sekolah secara aktif berpartisipasi pada kegiatan di KKKS/MKS sebagai gugus kendali mutu. Dalam forum ini kepala sekolah dapat saling bermusyawarah memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Bila dipandang perlu dapat mengundang konsultan dari luar, seperti pakar dari perguruan tinggi. Ketiga, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan guru di sekolah agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan khas bidang studi IPA, kepala sekolah dapat

berkoordinasi dan bekerja sama dengan MGMP IPA di tingkat Kabupaten/Kota.

Guru

Untuk memenuhi fungsi penjaminan mutu, sasaran pengawasan pendidikan di sekolah harus diarahkan pada pengamanan mutu layanan pembelajaran (apa yang terjadi di kelas/laboratorium). Dalam hal ini faktor guru paling dominan, sehingga pengawasan pendidikan di sekolah menaruh perhatian pada akuntabilitas profesional guru. Pengawasan pada tingkat ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas profesional guru, yang direfleksikan dalam kemampuan: (1) merencanakan pelaksanaan pembelajaran, (2) melaksanakan pembelajaran, (3) menilai proses dan hasil belajar, (4) memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan belajar, (5) memberikan umpan balik secara tepat, teratur, dan terus menerus kepada peserta didik, (6) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, (7) mengembangkan interaksi pembelajaran yang strategis dan efektif, (8) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, (9) mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran, (10) memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia, seperti buku, perpustakaan, laboratorium, lingkungan sekitar, (11) melakukan penelitian praktis (penelitian tindakan kelas) bagi perbaikan pembelajaran (Satori, 2001).

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, guru perlu menjalin kerja sama secara aktif dengan sesama guru, terutama dengan sesama guru IPA dalam musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Selain itu, guru juga harus menjalin kerja sama dan koordinasi dialogis kolegial dengan staf sekolah yang lain, seperti laboran, pustakawan, tenaga administrasi.

Staf Sekolah yang Lain

Yang termasuk staf sekolah yang lain adalah laboran, teknisi, petugas

perpustakaan, tenaga administrasi, tukang kebun. Mereka bersama-sama dengan guru merupakan pekerja di garis depan (*front liner*) yang langsung berhubungan dengan *customer*; terutama *customer* primer yaitu peserta didik. Oleh karena itu, mereka secara individu maupun secara kelompok (dalam gugus kendali mutu) harus bertanggung jawab terhadap pengamanan mutu layanan pendidikan di sekolah. Sehingga selain faktor guru, pengawasan pendidikan di sekolah juga mengarahkan perhatiannya pada akuntabilitas profesional staf pendukung itu. Pengawasan pada tingkat ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas profesional segenap staf sekolah, yang direfleksikan dalam kemampuan mendukung peningkatan mutu layanan dan hasil pembelajaran.

Sebagai ilustrasi, guru IPA tidak dapat melaksanakan tugas mengajar dengan pendekatan ketrampilan proses secara baik bila tidak dibantu oleh laboran dalam menyiapkan peralatannya di laboratorium. Demikian juga guru tidak mungkin menugaskan siswanya untuk menelusuri informasi di perpustakaan sekolah bila pustakawan tidak menyediakan layanan sebagaimana mestinya. Guru tidak dapat menelusuri latar belakang siswa yang bermasalah bila pegawai administrasi tidak menyediakan layanan untuk penelusuran dokumen siswa. Guru tidak dapat mengajar dengan tenang bila di sekolah tidak ada tukang parkir atau petugas satpam yang dapat dipercaya.

Pengawas Sekolah

Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 118 tahun 1996 Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang telah ditunjuk/ditetapkan. Berdasarkan KepMenPan tersebut terdapat empat jenis Pengawas Pendidikan di Sekolah, dan yang terkait dengan tugas pengawasan pendidikan

IPA di SMP dan SMA adalah Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran IPA atau secara singkat disebut Pengawas IPA.

Pengawas IPA mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan IPA pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggungjawab pengawas sekolah adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan IPA. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasannya di sekolah, pengawas melakukan dialog profesional dengan guru untuk menentukan standar yang akan dicapai.

Untuk meningkatkan keefektifan pengawasan dan pembinaan kepada guru, pengawas selain melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kepala sekolah, dapat juga memanfaatkan MGMP sebagai gugus kendali mutu untuk memahami permasalahan umum yang dihadapi guru-guru IPA. Dalam forum ini pengawas bersama-sama dengan guru inti dan anggota MGMP lainnya duduk bersama melakukan diskusi atau dialog profesional untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembelajaran IPA.

Kerja sama dan koordinasi juga perlu dilakukan oleh pengawas dengan sesama pengawas dalam forum KKPS atau MPS. Dalam forum ini, mereka bertukar pikiran dan mendiskusikan hasil temuannya di lapangan (sekolah).

Pemerintah

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai salah satu *stakeholder* yang berkepentingan terhadap mutu pendidikan di daerah kewenangannya, juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proses pendidikan. Untuk pemerintah pusat, tugas pengawasan ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas, sedangkan

pemerintah daerah oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

Bawasda merupakan lembaga pengawasan pemerintah daerah yang melakukan pengawasan meliputi seluruh bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ruang lingkup pekerjaan di bawah Dinas Pendidikan di daerah dengan sendirinya masuk ke dalam jangkauan pengawasan Bawasda. Namun, karena pengawasan sekolah menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan substansi pendidikan, mungkin Bawasda tidak memiliki kapasitas profesional untuk melaksanakannya. Untuk menjembatani kewenangan tersebut, Satori (2001) mengusulkan solusi sebagai berikut. Pertama, Bawasda membuka saluran dialog dengan kelompok pengawas sekolah. Dan, kedua, Bawasda mempercayakan sepenuhnya pelaksanaan pengawasan edukatif sekolah kepada para pengawas sekolah dalam koordinasi Dinas Pendidikan di daerah, dan Bawasda memperoleh laporan berkala hasil pengawasan.

Berdasarkan posisi kelembagaan Bawasda, lebih lanjut Satori memperkirakan akan lebih tepat apabila kewenangan pengawasannya ditujukan pada kinerja manajemen Dinas Pendidikan daerah, dan mengarahkan fokus pengawasannya antara lain pada: (1) program-program pengembangan sekolah (peningkatan mutu, pemerataan, dan perluasan layanan) dan dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan tersebut, (2) efektivitas penggunaan dan pemeliharaan gedung sekolah, dan (3) penyediaan alat dan fasilitas pendidikan serta pemanfaatannya.

Di tingkat pusat, fungsi pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pendidikan. Berdasarkan Keppres Nomor 165 tahun 2000, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi pengawasan fungsional di lingkungan Depdiknas. Fokus utamanya adalah pengawasan terhadap prestasi kerja serta pencapaian sasaran yang

merupakan kinerja pelaksanaan pemerintahan.

Dengan memperhatikan kewenangan pemerintah pusat, maka fokus pengawasan Inspektorat Jenderal Pendidikan diarahkan pada (1) pelaksanaan penerapan standar kompetensi siswa, (2) penerapan kurikulum, (3) pelaksanaan penilaian hasil belajar, (4) penerapan standar materi pelajaran pokok, (5) penerapan pelaksanaan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, dan (6) pelaksanaan penerapan persyaratan penerimaan, perpindahan, dan sertifikasi (Satori, 2001).

Gugus Kendali Mutu

Kegiatan pengawasan dapat pula memanfaatkan forum KKG, MGMP, KKKS/MKS, dan KKPS/MPS). Dalam konteks manajemen mutu terpadu (*total quality management*), forum-forum seperti itu dapat dipandang sebagai gugus kendali mutu (Sallis, 1993). Apabila diberdayakan sesuai dengan fungsinya, forum-forum tersebut sangat bermanfaat untuk mengamankan mutu pembelajaran dan peningkatan kinerja manajemen sekolah. Sebagai contoh, melalui forum KKPS/MPS para pengawas dapat mengkaji dan membahas hasil temuan pengawasannya, untuk dijadikan bahan umpan balik kepada guru dan kepala sekolah. Oleh sebab itu, antar gugus tersebut perlu saling bekerja sama atau berkoordinasi.

Lingkungan

Komponen lingkungan ini mencakup orang tua, masyarakat, perguruan tinggi, dunia kerja. Selama ini peran masyarakat terhadap sekolah masih belum intensif. Bahkan kesannya, orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah hanya dilibatkan pada waktu sekolah membutuhkan bantuan dana sumbangan, tetapi dalam hal kontrol mutu pendidikan mereka kurang dilibatkan.

Dari pihak lingkungan sendiri sebagai *customer* pendidikan sebenarnya mereka

memiliki hak atas layanan yang bermutu dari sekolah. Namun, karena belum terbangunnya budaya mutu diantara mereka, hak kontrol yang dimilikinya belum disadari dan belum digunakan secara baik.

Tanpa bantuan lingkungannya, terutama orang tua siswa dalam memenuhi segala kebutuhan anaknya dalam proses belajar baik di rumah maupun di sekolah, sulit bagi sekolah untuk melaksanakan proses pendidikan yang dapat menghasilkan layanan dan hasil belajar yang bermutu. Oleh sebab itu, kebutuhan, kepentingan, dan kepedulian masyarakat dan lingkungan lainnya harus dilindungi. Untuk itu dikembangkan wadah untuk menampung kepentingan dan kepedulian mereka yang diberi nama komite sekolah.

Komite sekolah ini merupakan komponen Manajemen Berbasis Sekolah yang merupakan format manajemen sekolah yang menawarkan makna kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan sekolah melalui *power sharing* dan *partnership* diantara berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah (*stakeholders*). Komite sekolah merupakan forum bagi masyarakat di sekitar sekolah untuk bersama-sama sekolah mengendalikan keterlaksanaan proses pendidikan dan bagaimana manajemen operatif sekolah memberikan dukungan bagi penyelenggaraan program-program sekolah. Fungsi pengawasan masyarakat melalui komite sekolah dilakukan di masing-masing sekolah, sehingga mereka merasa kepentingannya terpenuhi.

Outcome

Hasil atau *outcome* dari proses pengawasan pendidikan IPA adalah tercapainya mutu layanan dan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran itu sesuai spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPA yang mencakup produk dan proses, maka yang dimaksud jaminan mutu hasil pengawasan juga mencakup dua

hal tersebut. Keberhasilan pengawasan ini selain akan memberikan implikasi kepada terpenuhinya kebutuhan peserta didik sebagai *customer* utamanya, juga akan memberikan implikasi terpenuhinya harapan semua *stakeholder*.

STRATEGI IMPLEMENTASI

Di Indonesia, dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran, telah dirancang pedoman pelaksanaan supervisi pembelajaran. Pedoman ini didasarkan pada pemikiran bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA sebagaimana yang diharapkan, diperlukan suatu perencanaan yang baik. Untuk itu, guru IPA harus memiliki, menguasai, dan menyiapkan perangkat program pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa (Mohune dalam Paramata, 2001). Supervisi dapat dilakukan terhadap perencanaan program pembelajaran yang dipersiapkan guru dan proses pelaksanaannya di kelas hingga hasilnya yang ditunjukkan pada prestasi belajar.

Adapun metode dan teknik supervisi yang relevan untuk menjamin mutu layanan belajar dan mutu pengelolaan sekolah, menurut Satori (2001), mencakup: (1) kunjungan kelas, (2) pertemuan pribadi, (3) rapat guru, (4) kunjungan sekolah, (5) evaluasi diri, dan (6) *review* sekolah. Selain itu, kegiatan supervisi dapat memanfaatkan KKG, MGMP, KKKS/MKS, dan KKPS, MPS.

UKURAN KEBERHASILAN

Walaupun fungsi utama supervisi adalah mengamankan mutu layanan dan hasil belajar, namun keberhasilannya mencakup aspek yang lebih luas. Tabel 1 menunjukkan aspek-aspek keberhasilan supervisi dan indikatornya. Aspek dan indikator keberhasilan tersebut dikembangkan berdasarkan pada beberapa sumber, antara lain NSES (NAS, 1996), Hendrix, Claudet & Ellet, serta Ebmeier &

Nickalus (Paramata, 2001), dan berdasarkan modifikasi dari ciri-ciri dan indikator sekolah yang efektif berdasarkan hasil penelitian di Amerika Serikat, seperti dirumuskan oleh Taylor (Satori, 2001). Modifikasi dilakukan agar sesuai dengan karakter pendidikan IPA.

PENUTUP

Supervisi pendidikan IPA ditujukan terutama pada pengamanan mutu layanan belajar dan mutu hasil belajar. Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi harapan *customer* dan melindunginya dari proses layanan dan hasil pembelajaran yang tidak

Tabel 1

Aspek dan Indikator Keberhasilan Model Supervisi Pendidikan IPA
Bercirikan Dialog Profesional Kesejawatan

ASPEK KEBERHASILAN	INDIKATOR
Ketercapaian tujuan pembelajaran IPA	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan materi pelajaran sesuai dengan rencana (kurikulum) - Proses pembelajaran mencakup produk dan proses - Peningkatan prestasi belajar yang mencakup: pengetahuan, keterampilan, dan sikap - Berkurangnya siswa yang mengalami kesulitan belajar IPA
Siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan motivasi siswa dalam belajar IPA - Peningkatan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran - Peningkatan kedisiplinan dan kehadiran siswa - Kerelevanan aktivitas siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler - Keikutsertaan siswa dalam lomba ilmiah (seperti olimpiade sains) - Peningkatan kunjungan siswa ke perpustakaan
Guru	<ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan materi pelajaran, pengelolaan kelas, metode pembelajaran, dan teknik <i>assessment</i> - Peningkatan pemahaman terhadap kurikulum - Penyiapan perangkat program pembelajaran secara baik - Peningkatan kedisiplinan dan kehadiran guru - Kemampuan melaksanakan penelitian tindakan kelas - Kemampuan mengevaluasi diri sehingga memahami kelemahan dan kekuatannya - Kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri - Kemampuan berkolaborasi dan berperan aktif dalam MGMP
Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami karakter pembelajaran IPA - Memenuhi kebutuhan pembelajaran IPA - Bersikap responsif kepada guru, staf, dan siswa - Melaksanakan kepemimpinan yang terfokus pada pembelajaran - Mengembangkan kemampuan guru dan staf yang lain - Menghargai yang berprestasi dan membimbing yang bermasalah - Menciptakan rasa aman bagi guru, staf, dan siswa - Mengembangkan kerja sama dengan pihak lain - Melakukan evaluasi diri - Aktif dalam kegiatan KKKS/MKS
Dukungan staf sekolah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami karakter pembelajaran IPA - Memenuhi kebutuhan pembelajaran IPA sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya - Memiliki kesamaan persepsi terhadap peningkatan mutu layanan dan hasil belajar
Kerjasama/kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> - Terjalin komunikasi yang positif antara sekolah dan orang tua (masyarakat) - Terjalin dan terpeliharanya jaringan kerjasama produktif antara sekolah dan orang tua, masyarakat, dan lembaga lain. - Pemerintah, sekolah, masyarakat berbagi tanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan mempertahankan keberhasilan/mutu - Sekolah memelihara dukungan dan kepercayaan <i>customer</i> - Terjalin kerja sama yang kondusif antara kepala sekolah, guru, dan staf.
Atmosfir akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka peluang kompetisi yang sehat - Memberi penghargaan kepada yang berprestasi - Memberi penguatan terhadap perilaku positif siswa - Membimbing yang bermasalah - Mengutamakan masalah akademis - Mengembangkan suasana demokratis, kritis, keterbukaan, obyektif, dan ilmiah - Memelihara kerapian, kebersihan, dan keamanan secara fisik - Menegakkan peraturan sekolah dan pemerintah

bermutu. Pembelajaran IPA mencakup dua aspek, yaitu produk (konsep, prinsip, teori, hukum) dan proses (metode ilmiah).

Pelaksanaan supervisi akademik akan melibatkan berbagai pihak secara individu maupun kolektif. Untuk mendukung tugas dan fungsi supervisi dalam pembelajaran IPA, maka sinkronisasi interaksi antar berbagai pihak akan lebih baik bila dilakukan melalui dialog profesional kesejawatan dan menekankan kerjasama produktif yang saling menghargai.

Keberhasilan proses supervisi pendidikan IPA dalam konteks pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tidak hanya ditandai tercapainya tujuan pembelajaran, namun juga akan ditandai oleh peningkatan keterlibatan siswa, kinerja guru, kinerja staf sekolah, kinerja kepala sekolah, kerja sama produktif sekolah dengan pihak lain, serta atmosfer akademik yang mendukung peningkatan mutu. Keberhasilan proses supervisi juga akan memberikan implikasi pada ketercapaian harapan dan kebutuhan seluruh *customer* pendidikan IPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, E.T. 2001. *Diversifikasi Kurikulum Matematika*. Makalah pada Seminar Kurikulum Masa Depan Depdiknas, 6 Februari 2001, Jakarta.
- Eiss, A.F. 1976. Preparing for and Implementating Change. Dalam Harbeck. (Ed.). (1976). *2nd Source Book for Science Supervisors*. 82-97. Washington DC.: National Science Supervisors Association, National Science Teachers Association.
- Harbeck. (Ed.). 1976. *2nd Source Book for Science Supervisors*. 82-97. Washington DC.: National Science Supervisors Association, National Science Teachers Association.
- Matlin, M.W. 1994. *Cognition*. New York: Harcourt Brace Publishers.
- National Science Teaching Association (NSTA). 1997. *Standards for Science Teacher Preparation*. Association for Supervision and Curriculum Development. Tersedia <http://www.nsta.org/recommends> [18 Februari 2001].
- National Academy of Sciences (NAS). 1996. *Nasional Science Education Standards*. Washington DC.: National Academy Press.
- Paramata, Y. 2001. *Pengembangan Model Sosialisasi Inovasi dan Supervisi Pembelajaran IPA (Studi kualitatif pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Se-Kota Gorontalo)*. Disertasi Doktor. Bandung: PPs, UPI.
- Sallis, E. 1993. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page, Ltd.
- Satori, Dj. 2001. *Pengawasan Pendidikan di Sekolah*. Makalah disampaikan pada Rapat Konsultasi Pengawasan Pendidikan Inspektorat Jenderal (Itjen) dengan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Regional Tengah di Quality Hotel Solo 12 s.d. 27 September 2001.
- Satori, Dj. 1989. *Pengembangan Model Supervisi Sekolah Dasar (Penelitian terhadap Efektivitas Sistem Pelayanan/Bantuan Profesional bagi Guru-guru Sekolah Dasar di Cianjur Jawa Barat)*. Disertasi. Bandung: Fakultas Pascasarjana, IKIP Bandung.
- Setiono, K. 1983. *Teori Perkembangan Kognitif*. Bandung: Fakultas Psikologi, Unpad.
- Sidi, I. Dj. 2000. *Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Program Pendidikan Berbasis Kewilayahan Menyongsong Diterapkannya Kebijakan Otonomi Daerah, tgl 31 Agustus 2000 di UPI Bandung.
- Sutrisno. 2001. *Diversifikasi Kurikulum Fisika*. Makalah pada Seminar Kurikulum Masa Depan Depdiknas, tgl. 6 Februari 2001, Jakarta.